



Pertahankan Guru Tahfiz



ALIAHMADI/JAMBI ONE

ta, Diza Aljosa, menegaskan akan mempertahankan guru

Pemkot Siapkan Anggaran Rp 1,3 M

JAMBI- Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus berupaya mencari solusi terhadap nasib 73 guru tahfiz yang belum terakomodir dalam ketentuan perundang-undangan saat ini.

Langkah ini menyusul arahan langsung dari Wali Kota Jambi untuk memastikan keberlanjutan peran tenaga pendidik keagamaan di kota tersebut.

Kepala Bagian Kesejahter-

aan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Jambi, Kamal Firdaus, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terhadap para guru tahfiz.

"Dari 73 guru tahfiz, ada sekitar 6 orang yang mengundurkan diri. Kami lakukan pendataan ulang sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan," sebutnya.

"Penganggarannya juga sudah dipindahkan dari Dinas Pendidikan ke Kesra, menjadi kategori guru pembina," jelas Kamal, Selasa (6/5).

Sementara itu, Wali

Kota Jambi, dr Maulana, menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengangkat tenaga honorer baru.

Termasuk tenaga pengajar tahfiz, karena regulasi nasional saat ini tengah fokus pada pengangkatan tenaga honorer melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saat ini ada sekitar 5.000 tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi PPPK, dikurangi 1.400 yang sedang mengikuti ujian," sebutnya. ■

baca **Pertahankan** hal 5

PERTAHANKAN

dari hal 3

"Kita tidak bisa lagi merekrut honorer baru, termasuk ustadz-ustadzah yang tidak bisa ikut seleksi PPPK secara administratif," ujar Maulana.

Namun demikian, Pemkot Jambi tetap berkomitmen untuk mempertahankan keberadaan guru tahfiz me-

lalui Peraturan Wali Kota (Perwal).

Sebagai bentuk dukungan, alokasi anggaran sebesar Rp1,3 miliar telah dipindahkan ke Kesra.

"Ini bentuk keberpihakan kita terhadap pendidikan keagamaan. Yang penting

ada kepastian hukum," kata dia.

"Tidak boleh ada pembiayaan ganda, apalagi jika menyangkut ASN. Bisa berdampak pada pengembalian uang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK," tegas Maulana. (ali)